

# The Effect of E-Procurement, Internal Control Effectiveness, Good Governance, on Fraud Prevention with Organizational Ethical Culture as a Moderating Variable (Study on Local Government in East Java Province)

## Pengaruh E-Procurement, Efektivitas Internal Control, Good Governance, terhadap pencegahan Fraud dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur)

Dina Ayu Putri Juliandini<sup>1)</sup>, Sarwenda Biduri<sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: sarwendabiduri@umsida.ac.id<sup>1)</sup>

**Abstract.** The purpose of this study is to prove and analyze the influence of each of the e-procurement, efectivity internal control, good governance on fraud prevention with the ethical culture of the organization as a moderation variable. This study used the ULP Working Group (Procurement Service Unit Working Group) in the Sidoarjo Regency Government, Pasuruan Regency and Pasuruan City as its population with a total number of 66 people. Samples weree selected using the random sampling method. This study used a quaantitative apprroach with research data collected using a likert scale and tested using smartpls partial last square program data processing. From the callculation results, it is concluded that e-procurement, efectivity internal control, good governance have a significant direct influence on fraud prevention. Other results also show that e-procurement, efectivity internal control, good governance have an indirectly significant influence on fraud prevention which is influenced by another variable, namely the ethical culture of the organization.

**Keywords** - E-Procurement, Efectivity Internal Control, Good Governance, Fraud Prevention, Organizational Ethical Culture, Local Governments.

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisa pengaruh masing-masing dari e-procurement, efectivity internal control, good governance terhaadap pencegahan fraud dengan budaaya etis organiisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan) di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan sebagai populasinya dengan jumlah keseluruhan adalah 66 orang. Sampel dipilih dengan menggunakan metode random sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data penelitian yang dikur menggunakan skala likert dan diuji menggunakan olah data program partial last square SmartPLS. Dari hasil perhitungan disimpulkan bahwa e-procurement, efectivity internal control, good governance memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil lain juga menunjukkan bahwa e-procurement, efectivity internal control, good governance memiliki pengaruh yang signifikan secara tidak langsung terhadap pencegahan fraud yang dipengaruhi oleh variabel lain yaitu budaya etis organisasi.

**Kata Kunci** - E-Procurement, Efectivity Internal Control, Good Governance, Fraud, Budaya Etis Organisasi, Pemerintah Daerah

## I. PENDAHULUAN

Terwujudnya pembangunan di Indonesia dapat didukung oleh salah satu kegiatan operasional yang sangat penting yaitu aktivitas pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintahan. Dibutuhkannya peralatan dan jasa yang dapat menunjang optimalnya kinerja suatu pemerintah dalam menjalankan suatu fungsi instansi dipemerintahan. Namun, dalam waktu dekat ini semakin banyaknya kecurangan yang terjadi di sektor pemerintahan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pelayanan public dengan baik.

Lembaga kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKKP telah mengakui bahwa kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka pihak LKKP akan terus melakukan upaya pencegahan korupsi di sektor publik pengadaan barang dan jasa ini (News, 2019).

E-procurement merupakan alat untuk pengadaan barang dan jasa secara online yang biasanya digunakan oleh instansi pemerintahan dalam pengontrolan pengeluaran instansi pemerintah. Pada dasarnya e-procurement memiliki prinsip-prinsip yang

harus diperlakukan dalam penerapannya yaitu efisiensi, efektif, transparan, dan netral. Untuk menciptakan atau mencapai tata kelola pemerintah yang baik instansi pemerintah dapat menggunakan e-procurement. Sistem pengadaan barang/jasa dengan e-procurement akan memperkecil terjadinya pertemuan atau tatap muka dikarenakan hampir semua proses pengadaan/jasa dilakukan melalui teknologi berbasis internet. Berkurangnya tatap muka secara langsung akan mengurangi kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa karena akan menciptakan kecurangan seperti penyuapan, pemerasan, atau sesuatu yang menguntungkan salah satu pihak.

Selain e-procurement, ada juga pengendalian internal salah satu solusi untuk mencegah terjadinya fraud. Pengendalian internal adalah salah satu upaya awal untuk mencegah terjadinya fraud. Pengendalian internal yang paling banyak diterapkan yakni pengendalian internal yang aktif. Bisa dikatakan aktif yaitu seandainya pengendalian internal itu lemah, maka kemungkinan terjadinya fraud akan sangat besar. Begitu pula kebalikannya, terjadinya fraud dapat diperkecil jika pengendalian internalnya sangat kuat. Disamping pengendalian internal, terdapat dua konsep penting lainnya dalam pencegahan fraud, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (fraud awareness) dan upaya menilai resiko terjadinya kecurangan (fraud risk assessment) (Sofianingsih, 2014).

Adapun good governance yang dapat mempengaruhi timbul terjadinya kecurangan atau fraud. Mutu hubungan yang terjalin antara masyarakat dan pemerintahan yang dilayani dan dilindungi, sektor swasta atau dunia usaha, dan masyarakat merupakan pengertian umum dari good governance. Menurut Heriawati (2018), good governance sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menggunakan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan berbagai kegiatan atau proses perekonomian, sosial politik, dan kegunaan berbagai sumber daya seperti SDA, keuangan, dan SDM untuk keperluan rakyat yang dilakukan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Selain e-procurement, effectiveness internal control, dan good governance, terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencegahan fraud yakni budaya etis organisasi. Pada masing-masing individu dalam sebuah organisasi tentunya memiliki sistem nilai, norma dan kepercayaan yang merupakan pengertian dari budaya etis organisasi. Untuk menciptakan pelaku yang beretika tinggi, budaya yang etis dapat mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi. Melalui budaya etis organisasi diharapkan dapat menangkal tindakan - tindakan yang dapat memicu kerugian bagi organisasi dan tidak kalah pentingnya ialah upaya mencegah pegawai melakukan praktik kecurangan (Akbar dkk, 2019).

Permasalahan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sidoarjo, korupsi Rp 16,5 miliar, PNS Dinas Pangan Sidoarjo ditahan. Lukman Saleh (Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten

Sidoarjo ditahan karena diduga melakukan korupsi paket proyek Jitut Jides APBN 2015 senilai RP 16,5 miliar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dulunya bernama Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DP3). Proyek tersebut dipecah-pecah menjadi 63 paket proyek penunjukan langsung (PL) yang dibagikan kepada sekitar 30 rekanan. Padahal, proses tersebut telah melanggar Perpres Nomor 54 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa ujar Adi Harsanto (Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sidoarjo) (merdeka.com, 2017).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Heriawati (2018), terdapat pengaruh e-procurement dan good governance baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja pengadaan

barang/jasa. Hasil peniliti dari Mahardani (2014) ada pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (fraud). Penelitian lain yang dilakukan oleh Oktaviani (2017) ada beberapa faktor dari e-procurement yang tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sebelumnya dengan periode tahun yang berbeda, lokasi yang berbeda, dan kesenjangan pada penelitian terdahulu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh e-procurement, efektivitas internal control, good governance terhadap pencegahan fraud dengan budaya etis organisasi sebagai variabel moderasi.

## II. METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif karena di penelitian ini akan meneliti sampel dengan memakai data yang berbentuk angka maupun yang bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan serta menggunakan alat pengumpulan data utamanya berupa kuisioner yang dibagikan kepada Pokja ULP yang melakukan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan pengertian diatas, populasi dalam penelitian ini adalah Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan) dengan jumlah 66 orang dari instansi pengadaan barang/jasa pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan.

Y1	0.746	Kuat
Y2	0.744	Kuat
Y3	0.741	Kuat
Y4	0.804	Kuat
Y5	0.744	Kuat

Sumber : Olah Data SmartPLS 3.2.9, 2021

Berdasarkan pada interpretasi tersebut, maka dapat dianalisis bahwasannya : Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa kuisioner serta survey secara langsung ke lapangan agar mendapatkan informasi data yang valid dan tepat. Data yang diperoleh dengan menyebarluaskan kuisioner secara langsung kepada responden Pokja ULP yang bertugas dipengadaan barang/jasa Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu secara pasti variabel yang akan diukur serta mengerti apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2018:142). Jenis kuisioner yang dibagikan diukur dengan menggunakan skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi suatu indikator variabel yang dijadikan titik tolak dalam penyusunan beberapa pertanyaan dan disediakan dalam bentuk suatu angka atau skor. Skala likert yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan tingkatan yang terdiri dari :

**Tabel 1.** Pilihan Jawaban dan Skoring Kuesioner

Keterangan	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Inner model PLS menggambarkan hubungan satu variabel laten dengan variabel laten lainnya. Evaluasi model struktural (inner model) dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun telah robust dan akurat. Evaluasi inner model terdiri dari beberapa indikator, antara lain goodness of fit (GoF), koefisien determinasi disesuaikan (Adjusted R<sup>2</sup>), dan predictive relevance (Q<sup>2</sup>).

Goodness of Fit Model diukur menggunakan akar kuadrat dari nilai rata-rata average variance extracted (AVE) dikalikan dengan nilai rata-rata koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) variabel laten dependen. Adjusted R<sup>2</sup> menunjukkan besarnya pengaruh variabel-variabel indikator dapat menjelaskan

variabel latennya. Predictive relevance (Q2) untuk model struktural digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q2 dihitung menggunakan formula:

$$Q2 = 1 - \frac{R_{121} + R_{22\ldots} + \dots + R_p}{R}$$

p2 Dimana:

$Q2$  = Predictive relevance

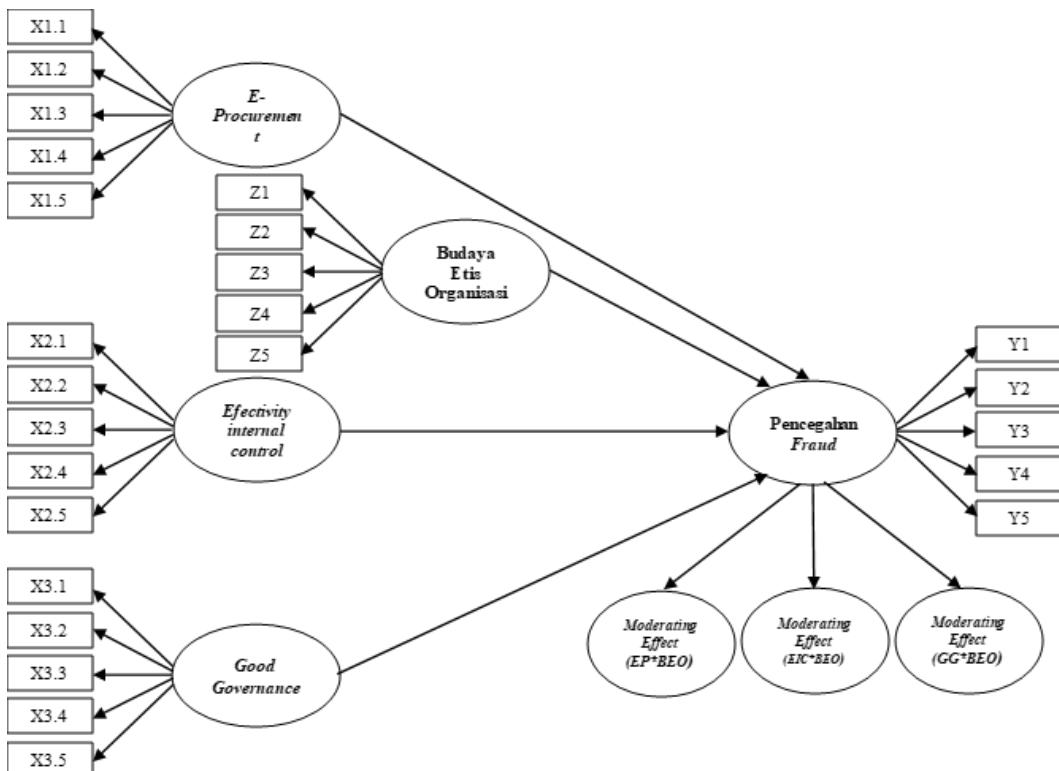
$R_{12}, R_{22}, \dots, R_p$  =  $R^2$  variabel endogen dalam model persamaan

Besaran  $Q2$  memiliki nilai dengan rentang  $0 < Q2 < 1$ , dengan dasar pengambilan keputusan:

- a) Jika nilai  $Q2 \leq 0$ , menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.
- b) Jika nilai  $Q2 > 0$ , menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance.
- c) Jika nilai  $Q2$  semakin mendekati angka 1, menunjukkan bahwa model semakin baik.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software SmartPLS. Model persamaan struktural dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Keterangan :

X1 : e-procurement

X2 : efektivitas internal  
control

X3 : good governance

Z : budaya etis organisasi

Y : pencegahan fraud

Tabel 2. Hasil Uji Descriptive Statistic Variable

Indikator Skewness	Mean	Median	Min	Max	Standard	Excess	Kurtosis (STDEV)
					Deviation (STDEV)		
X1.1	4.227	4.000	2.000	5.000	0.794	0.141	-0.810
X1.2	3.970	4.000	2.000	5.000	0.953	-0.386	-0.691
X1.3	4.136	4.000	2.000	5.000	0.886	-0.084	-0.811
X1.4	4.061	4.000	2.000	5.000	0.903	-0.147	-0.755
X1.5	3.970	4.000	2.000	5.000	1.029	-0.807	-0.620
X1.6	4.000	4.000	2.000	5.000	0.937	-0.134	-0.791
X1.7	3.970	4.000	2.000	5.000	0.758	0.412	-0.589
X1.8	4.076	4.000	2.000	5.000	0.840	0.214	-0.774
X1.9	3.955	4.000	2.000	5.000	0.806	0.217	-0.627
X1.10	4.121	4.000	2.000	5.000	0.807	0.271	-0.759
X2.1	4.061	4.000	2.000	5.000	0.715	1.494	-0.854
X2.2	3.864	4.000	2.000	5.000	0.757	0.954	-0.837
X2.3	3.970	4.000	2.000	5.000	0.738	0.707	-0.646
X2.4	3.697	4.000	2.000	5.000	0.758	-0.345	-0.060
X2.5	3.985	4.000	2.000	5.000	0.788	0.078	-0.543
X3.1	3.985	4.000	2.000	5.000	0.788	-0.416	-0.353
X3.2	3.985	4.000	2.000	5.000	0.707	0.542	-0.505
X3.3	3.909	4.000	2.000	5.000	0.773	-0.422	-0.241
X3.4	3.924	4.000	2.000	5.000	0.703	0.405	-0.426
X3.5	4.091	4.000	3.000	5.000	0.645	-0.572	-0.089
Y1	4.045	4.000	2.000	5.000	0.860	0.275	-0.820
Y2	3.955	4.000	2.000	5.000	0.747	0.510	-0.593
Y3	3.833	4.000	2.000	5.000	0.750	0.057	-0.371
Y4	3.848	4.000	2.000	5.000	0.702	-0.382	-0.045
Y5	3.879	4.000	2.000	5.000	0.769	0.411	-0.603
Z1	3.894	4.000	2.000	5.000	0.873	-0.357	-0.488
Z2	3.970	4.000	2.000	5.000	0.778	0.658	-0.737
Z3	3.833	4.000	2.000	5.000	0.665	-0.070	-0.111
Z4	3.909	4.000	2.000	5.000	0.773	0.477	-0.644
Z5	4.000	4.000	2.000	5.000	0.798	0.494	-0.733

Sumber : Olah Data SmartPLS 3.2.9, 2021

Hasil tabel 2 menjelaskan bahwa data dalam Penelitian ini sudah berdistribusi normal dikarenakan nilai mean lebih besar dari pada nilai standar deviasi. Output yang menjelaskan hubungan antara variabel laten dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.** Nilai Outer Loadings (Uji PLS Alogarithm)

Indikator	E-P (X1)	EIC (X2)	GG (X3)	BEO (Z)	Moderating Effect (EP*B EO)	Moderating Effect (EIC*BEO)	Moderating Effect (GG*BEO)	PF (Y)	Ket.
EP*BEO					1.368				Kuat
EIC*BEO						1.444			Kuat
GG*BEO							1.379		Kuat
X1.1	0.896								Kuat
X1.2	0.876								Kuat
X1.3	0.862								Kuat
X1.4	0.834								Kuat
X1.5	0.886								Kuat
X1.6	0.884								Kuat

X1.7	0.890	Kuat
X1.8	0.884	Kuat
X1.9	0.854	Kuat
X1.10	0.818	Kuat
X2.1	0.754	Kuat
X2.2	0.746	Kuat
X2.3	0.851	Kuat
X2.4	0.790	Kuat
X2.5	0.804	Kuat
X3.1	0.715	Kuat
X3.2	0.830	Kuat
X3.3	0.805	Kuat
X3.4	0.832	Kuat
X3.5	0.813	Kuat
Z1	0.770	Kuat
Z2	0.768	Kuat
Z3	0.804	Kuat
Z4	0.774	Kuat
Z5	0.816	Kuat

1. X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7, X1.8, X1.9, dan X1.10 memiliki korelasi yang kuat dengan variabel E-procurement
2. X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, dan X2.5 memiliki korelasi yang kuat dengan variabel Efectivity Internal Control.
3. X3.1, X3.2, X3.3, X3.4, dan X3.5 memiliki korelasi yang kuat dengan variabel Good Governance.
4. Z1, Z2, Z3, Z4 dan Z5 memiliki korelasi yang kuat dengan variabel Budaya Etis Organisasi
5. Y1, Y2, Y3, dan Y4 memiliki korelasi yang kuat dengan variabel Pencegahan Fraud

**Tabel 4.** Nilai Construct Reliability & Validity (Uji PLS Alogarithm)

Indikator	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Varians Extracted (AVE)
Budaya Etis Organisasi	0.846	0.845	0.890	0.619
E-Procurement	0.964	0.964	0.968	0.755
Efectivity Internal Control	0.848	0.851	0.892	0.624
Good Governance	0.858	0.858	0.899	0.640
Moderating Effect (EIC*BEO)	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderating Effect (EP*BEO)	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderating Effect (GG*BEO)	1.000	1.000	1.000	1.000
Pencegahan Fraud	0.813	0.814	0.870	0.572

Sumber : Olah Data SmartPLS 3.2.9, 2021

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai (AVE) memiliki nilai discriminant validity yang baik karena semua nilainya diatas 0.50 dan nilai Composite Reability untuk semua konstruk adalah lebih besar dari 0,70. Dengan demikian semua konstruk pada model yang diestimasi sudah memenuhi persyaratan internal consistensi reliability. Begitu juga dengan nilai Cronbach's alpha untuk semua variabel sudah lebih besar dari 0.70 sehingga sudah memenuhi syarat.

#### Pengujian model struktural (inner model)

**Tabel 5.** Nilai R2 dan Adjusted R2

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Pencegahan Fraud	0.951	0.945

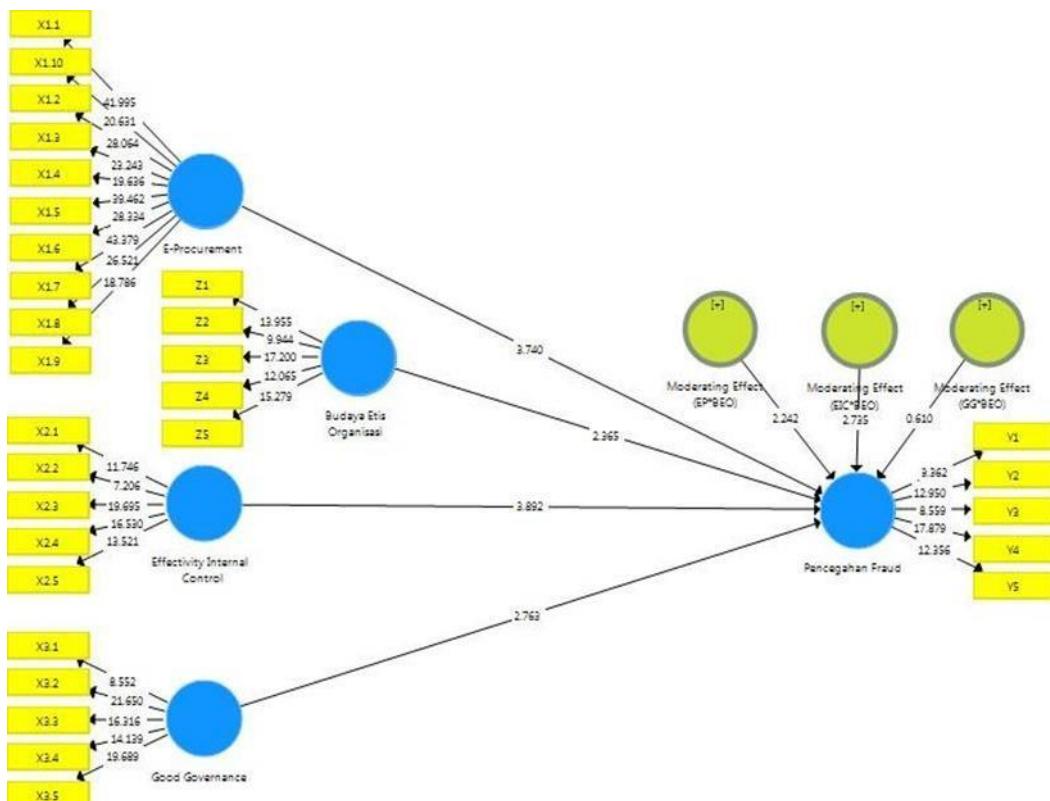
Sumber : Olah Data SmartPLS 3.2.9, 2021

#### Tabel 6. Path Coefficients

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

Hubungan Antar Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDE V)
Budaya Etis Organisasi -> Pencegahan Fraud	0.178	0.186	0.075	2.365
E-Procurement -> Pencegahan Fraud	0.289	0.275	0.077	3.740
Effectivity Internal Control -> Pencegahan Fraud	0.339	0.332	0.087	3.892
Good Governance -> Pencegahan Fraud	0.234	0.242	0.085	2.763
Moderating Effect (EIC*BEO) -> Pencegahan Fraud	0.257	0.266	0.094	2.735
Moderating Effect (EP*BEO) -> Pencegahan Fraud	-0.154	-0.155	0.069	2.242
Moderating Effect (GG*BEO) -> Pencegahan Fraud	-0.069	-0.079	0.114	0.610

Sumber : Olah Data SmartPLS 3.2.9, 2021



Gambar 2. Hasil Bootstrapping PLS

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen (efek langsung) dalam penelitian ini. Uji t dilakukan untuk menguji apakah hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima atau ditolak. Uji t dapat dilihat dari nilai probabilitas (p-value) dan nilai t-statistik. Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji apakah H1 dapat diterima atau tidak. Nilai probabilitas (p-value) dan nilai t-statistik yang digunakan sebagai acuan merupakan nilai dari hasil bootstrapping PLS model penelitian.

## IV. PEMBAHASAN

1. E-procurement berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan H1 **diterima**.
2. Efectivity internal control berpengaruh signifikan terhadap pencegahaan fraud di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan H2 **diterima**.
3. good governance berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan H3 **diterima**.
4. E-procurement berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan buudaya etis organisasi sebagai variabel pemoderasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan H5 **diterima**.
5. efectivity internal control berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan budaya etis organisasi sebagai variabel pemoderasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan H6 **diterima**.
6. good governance tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan budaya etis organisasi sebagai variabel pemoderasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan H7 **ditolak**.

## V. KESIMPULAN, KETERBASAN, DAN SARAN

Penelitian ini berfokus pada i mplementasi *e-procuremen*, *effectivity internal control*, *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dengan budaya etis organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan di Pokja ULP yang bertugas dipengadaan barang/jasa di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan serta saran yang dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian sejenis. Pertama, indikator yang dipilih hanya berdasarkan ketersediaan informasi yang diperoleh, namun tidak semua yang disajikan karena keterbatasan ruang gerak peneliti dalam menggali informasi pelaksanaan sistem pemerintah daerah yang luas. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih menspesifikasi sampel yang akan diteliti, misalnya pada Pemerintah Daerah yang pernah terjadi kasus kecurangan dalam pengadaan barang/jasa. Kedua, penelitian hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah yang dekat dengan domisili, tanpa merujuk pada suatu kasus kecurangan yang terjadi di Pemerintah Daerah yang lain. Saran untuk peneliti selanjutnya, menambah objek penelitian menjadi lebih dari satu kabupaten/kota agar penelitian secara keseluruhan dapat digeneralisasikan. Ketiga, penelitian ini belum mampu memaksimalkan indikator variabel budaya etis organisasi dikarenakan terbatasnya data aspek penilaian nyata dalam sistem pemerintahan pada Pemerintah Daerah. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menggali informasi tentang ada tidaknya keberadaan penilaian kinerja pegawai dilingkup Pemerintah Daerah.

## REFERENSI

- [1] News, “<https://www.google.com/amp/s/www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/KPK-Periksa-Dua-wiraswastawan-Kasus-Korupsi-Wali-Kota-Pasuruan/>,” *Surabaya, Suara*, 2019. .
- [2] D. Sofianingsih, “Pengaruh komponen struktur pengendalian internal untuk mencegah kecurangan pada perusahaan,” 2015.
- [3] O. Deborah Iyinomen and O. Teresa Nkechi, “Effect of Internal Control on Fraud Prevention and Detection in the Public Sector in Nigeria,” vol. Journal of, p. 2(4), 21–27, 2016.
- [4] L. I. A. Heriawati, “Program pascasarjana magister ilmu administrasi institut ilmu sosial dan manajemen stiami jakarta 2018,” 2018.
- [5] S. Hermawan and Amirullah, “metode penelitian bisnis pendekatan kuantitatif dan kualitatif,” vol. M. N. Crea, 2016.
- [6] “<http://ditalafah.blogspot.com/2016/11/perkembangan-teori-fraud.html?m=1>,” 2016. .
- [7] A. G. Akbar and W. Andayani, “Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang / Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi The Impact of a Procurement Implementation and Government Internal Control S,” pp. 69–81, 2019.
- [8] “<https://sarjanaekonomi.co.id/fraud-menurut-para-ahli/>.”
- [9] Merdeka.com, “<https://m.merdeka.com/periwi/korupsi-rp-165-miliar-pns-dinas-pangan-sidoarjo-ditahan.html>.” .

- [10] Jawapos.com, “<https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/01/2020/bupati-sidoarjo-kena-ott-kpk-terkait-dugaan-pengadaan-barang-dan-jasa/%3famp>,” 2020. .
- [11] “<https://m.detik.com/news/berita/d-4773768/lkkp-korupsi-barangjasa-pemerintah-diduduki-posisi-2-kasusyang-ditangani-kpk>,” *detik.com*. .
- [12] R. Syakina and Cahyani, “Analisis Penerapan E-Procurement dalam Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Inalum (Persero).,” 2017.
- [13] L. Oktaviani, “Pengaruh Penerapan E-Procurement terhadap Pencegahan dan Pendeketian Fraud di Sektor Publik (Studi EMpiris pada satuan kerja perangkat daerah Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok, KAbupaten Pesisir Selatan),” 2017.
- [14] Sugiyono, *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [15] M. Lintangsari, D. W. Hapsari, and E. Budiono, “Pengaruh Implementasi E- Procurement dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud ( Studi Empiris pada PT . PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Barat dan Banten ) The Effect of E-Procurement Implementation , Internal Control of Preventing Fraud ( Empir ,” p. 4(3), 2661–2666, 2017.

***Conflict of Interest Statement:***

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*